

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klaten)

*Enita Binawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia

email: enitabinawati@gmail.com

Cyrenia Tri Nindyaningsih

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia

email: cyrenia.tn@gmail.com

**Corresponding Author*

Abstract

This study aims to determine moderating effect of local financial accounting system, determine human resource competencies, internal control systems, and information technology on the quality of local financial statement. The population in this study are part of the accounting/financial administration department staff (SKPD) in Klaten Government, such as 24 Department with criteria have a minimum term of one year in the period of preparation of financial statement. This study used 152 people as respondents. The data were collected by using questionnaires. The analytical method used in this research is descriptive quantitative analysis method. The data analysis was done by using multiple linear regression tests with testing t at a significance level of 5%.

The result showed that, simultaneously at variable utilization of local financial accounting system, determine human resource competencies, internal control systems, and information technology has a significant effect to quality of local financial statement as evidenced from the result simultaneous test (F Test). Partially showed the results of local financial accounting system, determine human resource competencies, internal control systems, and information technology has a significant effect to quality of local financial statement as evidenced from the result partial test (t Test).

Keywords: local financial accounting system, determine human resource competencies, internal control systems, information technology and quality financial statement.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moderasi sistem akuntansi keuangan daerah, mengetahui kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/administrasi keuangan (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Klaten sebanyak 24 Dinas dengan kriteria memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam masa penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan 152 orang sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan uji t pada taraf signifikansi 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, penentuan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas penatagunaan keuangan daerah yang dibuktikan dari hasil uji simultan (Uji F). Secara parsial menunjukkan hasil sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi menentukan sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas akuntansi keuangan daerah yang dibuktikan dari hasil uji parsial (Uji t).

Kata kunci: sistem akuntansi keuangan daerah, menentukan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi dan laporan keuangan yang berkualitas.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Peran serta masyarakat dalam pemerintah sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan perekonomian negara.

Pemerintah adalah entitas pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut. Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya ialah laporan keuangan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, telah dilakukan beberapa upaya-upaya yang diantaranya: pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menurut suatu perubahan mendasar di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga harus bersifat transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai dan manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi (Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih)

pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Unsur-unsur dalam laporan keuangan yang akan disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK), auditor independen akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), selain itu penyajian laporan keuangan harus patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian internal, bukti-bukti yang memadai dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat Opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (*Hardware* dan *Software*).

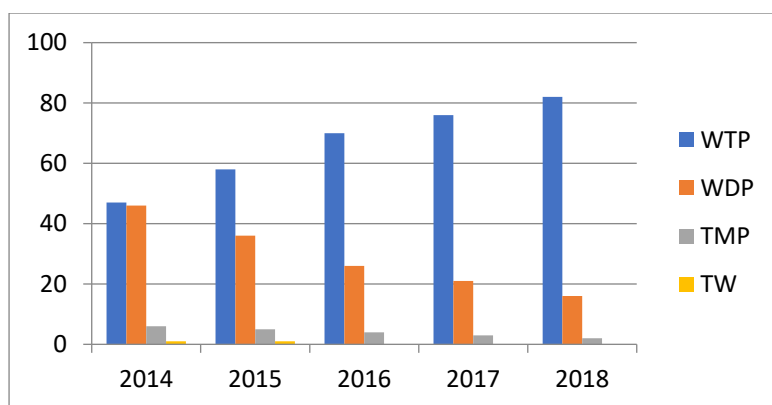
Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan dan atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisasi terjadinya suatu kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Hal ini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut, dan kendala lainnya yang merupakan keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi (Karmila, 2012:28).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menjadi terkomputerisasi (Hamzah, 2009). Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data,

kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan akan keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Sistem pengendalian yang efektif mengacu pada langkah-langkah pengendalian yang efektif yang dibentuk oleh organisasi dengan tujuan menjamin keandalan catatan baik keuangan maupun non keuangan seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang akan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Badara, 2013:18). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: (a) efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, (b) kendala laporan keuangan, (c) pengamanan aset negara.

Grafik Perkembangan Opini LKPD Tahun 2014-2018



Sumber: IHPS I 2019, BPK RI

Dari tabel di atas terlihat bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menurun dari tahun 2014 sampai 2018 dan juga opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) mengalami penurunan yang artinya hasil penilaian LKPD dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian, tetap saja ada beberapa pemerintah daerah yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah tentang apa saja penyebab dari pemerintah daerah belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah daerah juga perlu untuk meningkatkan sistem pengendalian internal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan wajar yang juga merupakan suatu gambaran dari pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi
(Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih)**

Tabel Daftar Opini LKPD Pemerintah Kabupaten Klaten

| No | Tahun | Opini |
|----|-------|---------------------------|
| 1 | 2014 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2 | 2015 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 3 | 2016 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 4 | 2017 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 5 | 2018 | Wajar Tanpa Pengecualian |

Sumber: https://semarang.bpk.go.id/?page_id=9051

Tabel di atas menjelaskan bahwa adanya perubahan opini yang terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Klaten. Pada tahun 2014 dan 2015 Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2016 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pada laporan Dana Desa. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Klaten kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh ketidaksesuaian penyajian akuntansi pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Klaten menaikkan prestasinya dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berjalan sesuai dengan tujuan yang ditargetkan.

Penelitian mengenai topik penerapan sistem akuntansi daerah juga telah dilakukan oleh Aditya (2018) yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung" (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Bandung), hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan, sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai sistem akuntansi daerah dan kompetensi sumber daya manusia juga menunjukkan hasil negatif terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Haty (2018) yang berjudul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta). Dari penelitian tersebut memiliki hasil penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penjelasan di atas, adanya perbedaan hasil penelitian dan juga dari daftar opini LKPD Pemerintah Kabupaten Klaten yang memiliki perbedaan dari tahun 2014-2018, dan ingin lebih mengeneralisasi hasil, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
5. Untuk menguji secara empiris dan simultan pengaruh positif simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dalam PSAP 01 adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya. Bastian (2010:9) mendefinisikan kualitas laporan keuangan sebagai berikut "kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan".

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menerangkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah "Sistem akuntansi pemerintah daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer". Menurut Erlina (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai "sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)". Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian sistem dari mulai proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak luar, maupun internal pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi.

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi
(Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih)
Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, SKPD harus mempunyai kompetensi yang sudah ditentukan ambang nilainya. Penentuan ambang kompetensi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM. Kompetensi merupakan kemampuan untuk melakukan peran pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja. Untuk mewujudkan kompetensi sesuai dengan perannya, seorang akuntan profesional harus memiliki (a) pengetahuan profesional yang diperlukan, (b) ketrampilan profesional, (c) nilai, etika dan sikap profesional. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individual dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau memiliki kinerja yang prima di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Sudarmanto (2015:49) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan potensial yang terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan fungsi jabatan sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efisien dan efektif. Pengendalian intern ini dimaksudkan agar kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat ditekan. Pengendalian intern tidak hanya menyangkut masalah penelaahan atas catatan, tetapi juga meliputi penilaian atas berbagai fungsi operasional dalam suatu perusahaan. Untuk itu, diperlukan pengendalian intern yang baik yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengendalikan perusahaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah "sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pasal 1 (10), mendefinisikan "sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian, efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan".

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Menurut Thompson et al (1991) dalam Ariesta (2015:3), pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan”.

PERUMUSAN HIPOTESIS

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian sistem dari mulai proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan sehingga menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak luar, maupun internal pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu tujuan dari sistem akuntansi keuangan daerah adalah menjadikan informasi laporan keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan informasi keuangan andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak ekstern pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Aditya (2018) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan berbanding lurus dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dihasilkan dari adanya suatu sistem akuntansi. Penelitian Aditya (2018) merupakan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa secara parsial maupun simultan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka sampai pada pemahaman penulis bahwa sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, dengan adanya penerapan sistem akuntansi daerah yang baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H1: Terdapat pengaruh positif antara penerapan sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, SKPD harus mempunyai kompetensi yang sudah ditentukan ambang nilainya. Untuk mewujudkan kompetensi sesuai dengan perannya, seorang akuntan profesional harus memiliki (a) pengetahuan profesional yang diperlukan, (b) ketrampilan profesional, (c) nilai, etika dan sikap profesional. Waktu yang cukup yang dimiliki para pegawai, sumber dana yang sudah dialokasikan untuk meningkatkan kualitas implementasi anggaran, dan kapasitas dan kualitas orang atau pegawai yang mampu dalam menganalisis kinerja program maka dapat digunakan untuk menilai kualitas keandalan dalam anggaran yang berbasis kinerja sehingga dapat diimplementasikan secara efektif (Binawati, 2015).

Menurut Yendrawati (2013) yang merupakan penelitian terdahulu, kompetensi sumber daya manusia, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi (Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih)

Ramadhan (2018) menemukan bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti berpendapat bahwa semakin kompeten sumber daya manusia pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

H2: Terdapat pengaruh positif antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efisien dan efektif. Pengendalian intern ini dimaksudkan agar kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat ditekan.

Chodijah (2018) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern merupakan pondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan Yendrawati (2013) yang menyatakan bahwa walaupun sistem pengendalian intern yang ditetapkan sudah bagus tapi tidak efektif maka akan menghasilkan laporan keuangan yang kurang tepat sehingga kualitas laporan keuangan ini kurang baik dan tujuan *good governance* ini tidak tercapai. Penulis mempunyai pendapat bahwa semakin baik dan efektif penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3: Terdapat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

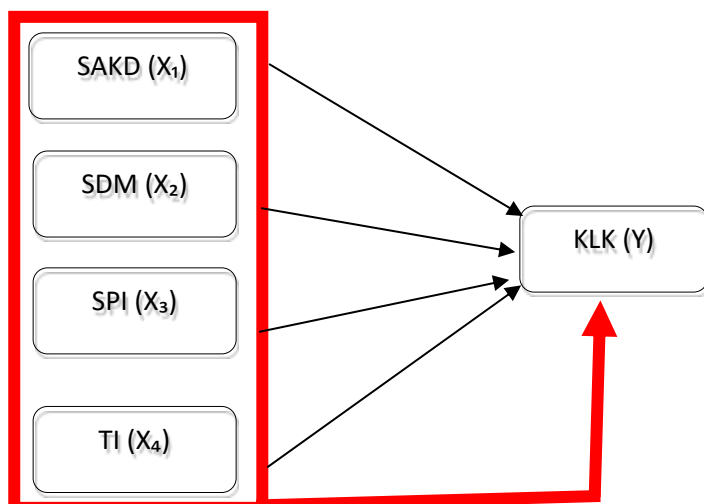
Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus persyaratan bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Teknologi informasi sangat dibutuhkan organisasi untuk membantu mencapai tujuannya.

Penelitian Febianty (2018) menjelaskan bahwa secara parsial dan simultan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chodijah (2018). Sehingga peneliti berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan juga pelaporan dapat dilakukan secara tepat waktu karena dapat mempercepat pengolahan laporan.

H4: Terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H5: Terdapat pengaruh positif secara simultan antara penerapan sistem akuntansi daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:13). Adapun metode yang dipilih dan akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode survei. Dalam survei, informasi diperoleh dengan menggunakan kuisioner yang datanya dikumpulkan dari responden atau populasi yang akan menjadi sampel penelitian. Kuisioner dalam penelitian ini akan didesain sedemikian rupa, yang kemudian akan diisi oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Peneliti tidak mengembangkan sendiri model pertanyaan dalam kuisioner melainkan menggunakan model pertanyaan yang telah ada dan digunakan pada penelitian terdahulu. Kuisioner yang digunakan akan mengukur satu variabel dependen dan empat variabel independen sesuai model penelitian yang telah ditetapkan. Skala yang digunakan untuk pengukuran adalah skala likert yang dinyatakan dengan interval angka 1 sampai dengan angka 5.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah 168 staf devisi keuangan dan akuntansi SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi (Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih)

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2005). Menurut Sugiyono (2012) ukuran sampel yang layak dalam penelitian ini yakni antara 30 sampai 500. Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 168 responden, sampel dalam penelitian ini adalah SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten devisi keuangan dan akuntansi, dengan kriteria bekerja minimal satu tahun.

Variabel Penelitian

Variabel dependen adalah sebuah variabel yang nilainya akan dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel independen (Sugiarto, 2017: 78). Variabel dependen disebut juga variabel terikat atau yang dipengaruhi. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan (Y). Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen (terikat) (Sugiarto, 2017: 78). Variabel ini disebut juga variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi daerah (X1), kompetensi sumber daya manusia (X2), sistem pengendalian intern (X3), dan pemanfaatan teknologi informasi (X4).

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda yaitu suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Persamaan analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2016:192):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = Variabel dependen

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:184) sebagai berikut:

Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi

| Besarnya Pengaruh | Tingkat Hubungan |
|-------------------|------------------|
| 0,00 - 0,199 | Sangat Lemah |
| 0,20 - 0,399 | Lemah |
| 0,40 - 0,599 | Sedang |
| 0,60 - 0,799 | Kuat |
| 0,80 - 1,000 | Sangat Kuat |

Sumber: Sugiyono (2017:184)

Uji t

Menurut Ghozali (2013:178) Uji t pada dasarnya menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Berdasarkan uji yang akan dilakukan dengan uji statistik t maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

H₀ : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_A : Ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Dasar analisisnya yaitu:

- a. H₀ diterima dan H_A ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau jika nilai Sig. $> 0,05$.
- b. H₀ ditolak dan H_A diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika nilai Sig. $< 0,05$.

Uji F

Uji F menurut Ghozali (2013:177) menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₀: Tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_A: Ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

- a. H_A diterima jika signifikansi $< \alpha$ maka H₀ ditolak.
- b. H_A ditolak jika signifikansi $> \alpha$ maka H₀ diterima

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi
(Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih)**

HASIL PENELITIAN

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten divisi keuangan dan akuntansi, dengan kriteria bekerja minimal satu tahun. Kuesioner yang dijadikan acuan pengolahan data berjumlah 152. Hasil analisis regresi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | B | Std. Error | Beta |
| 1 (Constant) | 3.039 | 1.326 | |
| Penerapan SAKD | .189 | .067 | .180 |
| Kompetensi SDM | .122 | .039 | .144 |
| SPI | .372 | .059 | .384 |
| Pemanfaatan IT | .244 | .047 | .311 |

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dapat dibuat suatu model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,039 + 0,189X_1 + 0,122X_2 + 0,372X_3 + 0,244X_4$$

1. Nilai konstanta sebesar 3,039 dapat diartikan apabila Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2), Sistem Pengendalian Intern (X_3), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4) nilainya tetap atau tidak mengalami perubahan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar 3,039.
2. Nilai koefisien beta pada variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,189 artinya setiap perubahan variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,189 satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Peningkatan satu satuan pada variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,189 satuan.
3. Nilai koefisien beta pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,122 artinya setiap perubahan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,122 satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Peningkatan satu satuan pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,122 satuan.

4. Nilai koefisien beta pada variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,372 artinya setiap perubahan variabel Sistem Pengendalian Intern (X_3) sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,372 satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Peningkatan satu satuan pada variabel Sistem Pengendalian Intern akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,372 satuan.
5. Nilai koefisien beta pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,244 artinya setiap perubahan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4) sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,244 satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Peningkatan satu satuan pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,244 satuan.

Hasil Uji Hipotesis

Berikut hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) yaitu sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t)

| Model | Unstandardized Coefficients | | T | Sig. |
|----------------|-----------------------------|------------|-------|------|
| | B | Std. Error | | |
| 1 (Constant) | 3.039 | 1.326 | 2.293 | .023 |
| Penerapan SAKD | .189 | .067 | 2.821 | .005 |
| Kompetensi SDM | .122 | .039 | 3.132 | .002 |
| SPI | .372 | .059 | 6.328 | .000 |
| Pemanfaatan IT | .244 | .047 | 5.223 | .000 |

1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil dari $< 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari $< 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi
(Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih)**

artinya bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasilnya bahwa nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari $< 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari $< 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berikut hasil uji simultan (Uji Statistik F) yaitu sebagai berikut :

Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F)

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | 2664.891 | 4 | 666.223 | 180.675 | .000 ^a |
| Residual | 542.050 | 147 | 3.687 | | |
| Total | 3206.941 | 151 | | | |

Berdasarkan hasil uji statistik F, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari $< 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “ (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas SKPD Di Kabupaten Klaten). Berdasarkan hasil analisis dan pengujian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis data diperoleh bahwa variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,005 yang berarti $< 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang

menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdukung. Penelitian ini juga didukung oleh Aditya (2018) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Hasil analisis data diperoleh bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti $< 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdukung. Penelitian ini juga didukung oleh Maysaroh (2018) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Hasil analisis data diperoleh bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdukung. Penelitian ini juga didukung oleh Aditya (2018) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Hasil analisis data diperoleh bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdukung. Penelitian ini juga didukung oleh Chodijah (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Hasil analisis data secara simultan diperoleh bahwa variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdukung.
6. Hasil analisis uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Sistem Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai hitung R^2 sebesar 0,826 atau 82,6% yang berarti nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi (Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih)

Informasi menjelaskan variasi variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 82,6% dan sisanya sebesar 17,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

Saran

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kemampuan mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pembuatan laporan keuangan agar mempunyai kualitas yang bagus.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen serta menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini misal pengawasan keuangan daerah.
3. Dari hasil penelitian, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, oleh karena itu untuk mendukung dan memaksimalkan sistem maka lebih baik diadakan sosialisasi dan webinar.
4. Dari hasil penelitian, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, oleh karena itu untuk mengefektifkan sumber daya manusia yang ada, pemerintah mengadakan uji kompetensi (*assesment*) untuk menilai kinerja sumber daya manusia, dan melakukan *recurrent* atau pelatihan guna memperbaharui informasi dan sistem yang berlaku.
5. Dari hasil penelitian, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, oleh karena itu untuk memaksimalkan sistem pengendalian ini, pemerintah lebih meningkatkan kinerja pengawas dan juga melakukan penengecekan dua kali dalam pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
6. Dari hasil penelitian, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, oleh karena itu untuk memaksimalkan teknologi informasi, pemerintah lebih baik menjaga kestabilan jaringan internet, melengkapi perangkat komputer yang memadai dan mempunyai lisensi aplikasi resmi agar data keuangan yang telah diinput terjaga kerahasiannya dan laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Aditya, A Pane. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecurangan Survei Pada Pemprov Sumatera Utara*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 4(2):40-48.
- Arens et al. 2011. *Jasa Audit dan Assurance*, Alih bahasa Amir Abdu Jusuf, Buku 1, 2011, Jakarta: Salemba Empat.
- Ariesta, Fadila. 2014. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)*. EJournal, Universitas Negeri Padang.
- Badara, M.S., dan Saidin. 2013. *Pengaruh Sstem Pengendalian Intern dalam Audit Internal Paada Laporan Keuangan Daerah*. *Journal of Social and Develpoment Sciences*:16-23.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Binawati, Enita. 2015. *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pad Pemerintah DIY*. Jurnal Wahana. Vol. 18 No.01.
- Chodijah, Siti dan Hidayah, Nurul. 2018. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Skpd Provinsi Dki Jakarta)*. Jurnal Tekun. Vol8. No. 1.
- COSO. 2013. *International Control – Integrated Framework: Executive Summary*. North Carolina: Durham.
- Erlina, Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*. Medan: Brama Ardian.
- Febianti, Irma. 2018. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Survei Pada Pemerintah Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.
- Geovannie, HL. 2016. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kesesuaian Tugas-Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual Instansi Pemerintahan Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*. Jurnal. Vol.08 No.01.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (Prayogo, Ed.) (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi
(Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih)**

Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Kerja Grafindo Persada.

Herry. 2014. *Auditing I, Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: Kencana.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2010. *Penryataan Standar Akuntansi Pemerintah (PASAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. Jakarta.

Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir*. Pontianak: Simposium Nasional Akuntansi XI.

International Federation of Accountants (IFAC) dalam IASB. 2014. *Handbook of International Education Pronouncement*. New York: <http://www.ifac.org>.

Irwansyah, Edy dan Jurike V. Moniaga. 2014. *Pengantar teknologi Informasi*. Yogyakarta: deePublish.

Jogiyanto, 2010. *Sistem Teknologi Informasi. Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknolgi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Karmila, Tanjung, dan Darlis. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Terhadap Ketarandalan Pelaporan Keuangan Pemerinth Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Riau)*. Jurnal Sorot. Vol. 09 No. 01.

Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. 2013. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Maysaroh, Katin Wilda. 2018. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Sukoharjo)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mustafa, Santiadji. 2010. *Analisis faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*. Skripsi. Universitas Haluleo.

Pasha, Arizal. 2018. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Patra, A. Dahri Adi, Lanteng Bustami, Hasriani. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi, Vol. 02 No. 01.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
- Permendagri Tahun 2007 Nomor 59 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prabangsari, Anissa Putri. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah, Sistem pengendalian Intern dan kompetensi sumber daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan keuangan Dengan Standar akuntansi Berbasis Akrua Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Badan Dan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pujanira, Putriasri. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY*. Jurnal Nominal / Volume VI Nomor 2.
- Ramadhan, Haty, Febrian dan Trisnawati. 2018. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber daya Manusia, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta*. Sripsi Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rudolf Wennemar Matindas. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha*. Edisi Kedua. Jakarta: Grafiti.
- Situmorang, Jonny. 2016. *Pengaruh sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Pada Dispenda dan Inspektorat Pemerintah Kota Cimahi*. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.
- Sudarmanto. 2015. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke Duabelas. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati. 2014. *Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. STIE STEMBI.
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi
(Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih)**

- Triyani, Zelda. 2018. *Pengaruh Sistem Informasi akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi Pada Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro*. Skripsi. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yendrawati, Reni. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Vol. 17 No.02.